PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar Hari: Sabtu Tanggal: 19 November 2022 Halaman: 12

Pendidikan Politik Menuju Pemilu 2024 Bermartabat dan Berbudaya

Upayakan Jangan Sampai Ada Daftar Pemilih Tercecer

Pendidikan politik dengan menyasar berbagai kelompok masyarakat digelar. Ini sebagai salah satu upaya persiapan menghadapi Pemilu 2024. Kegiatan disiapkan agar tak ada daftar pemilih tercecer dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Demikian pula dapat melahirkan pemilu bermartabat dan berbudaya.

PERSIAPKAN MASYARAKAT: Workshop pendidikan politik di Hotel Grage Bussiness Jalan Sosrowijayan, Jogja, kemarin (18/11). Kegiatan ini sebagai salah satu upaya mempersiapkan masyarakat menghadapi Pemilu 2024.

FOTO-FOTO: WINDA ATIKA IRA P/RADAR JOGJA

KETUA Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan, beberapa hal penting harus dilakukan bersama untuk melahirkan pemilu yang bermartabat dan berbudaya serta bergaya Jogja. Sebaran hoaks pemilu, *money politics*, pemindahan suara ke kubu lain oleh oknum hingga tercecernya pemilih yang berhak, diharapkan tidak terjadi lagi di tahun 2024 mendatang.

"Pemilu itu ekosistem. Ada tiga aktor yaitu pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat pemilih itu sendiri. Tapi ekosistem sekarang berkembang luas, namanya teknologi informasi," katanya di sela Workshop Pendidikan Politik di Hotel Grage Bussines, Jalan Sosrowijayan, Jogja, kemarin (18/11).

Eko menjelaskan, pendidikan politik menjadi penting bagi perangkat kelurahan dan kemantren serta tokoh masyarakat di Kemantren Tegalrejo untuk mempersiapkan Pemilu 2024. Ini agar mereka dapat menyebarluaskan informasi yang benar dan mendidik para pemilih agar semakin bijak memilih. Serta tidak adanya perpecahan atau keterbelahan setelah pemilu berlangsung. "Beda partai dan pilihan biasa-biasa saja. Ke depan tidak boleh terjadi keterbelahan akibat penggunaan politisasi isu SARA yang sangat keras. Tidak perlu baper," ujarnya.

Demikian pula para tokoh atau peserta *workshop* juga diminta, baik tokoh masyarakat, RT, RW, kampung, LMPK untuk membantu menjaga kondusivitas di wilayahnya masing-masing, agar tidak terjadi konflik. Mereka yang siap dan memiliki komitmen didorong untuk mendaftar pembentukan Badan Ad Hoc untuk membantu pelaksanaan kerja KPU terkait pemilu, baik PPK, PPS maupun KPPS.

Dalam kesempatan ini, Eko menceritakan pengalaman di lapangan dan sejumlah temuan yang terjadi. Atas dasar pengalamannya itu kemudian merumuskan berbagai usulan dan kebijakan kepada pihak terkait, agar tidak terjadi lagi di tahun mendatang. Salah satunya masih banyaknya warga yang seharusnya berhak menjadi pemilih, namun tidak terjaring sebagai pemilih.

Termasuk yang pada saat coblosan sudah masuk usia 17 tahun. Atau anggota TNI/Polri yang sebelum hari coblosan sudah pensiun dan temuan lainnya. "Di rekapitulasi pemutakhiran data pemilih belum ada, belum menjadi bagian yang dibahas KPU dan partai politik. Yang dibahas hanya yang umur 17 tahun ke atas terekam dengan KTP," jelasnya.

Padahal, Eko menyebut di Kota Jogja sendiri belum 100 persen e-KTP, masih kurang 0,14 persen per Oktober. Ini artinya masih ada penduduk Jogja yang belum ber-KTP, atau 0,14 persen penduduk Jogja tidak masuk daftar pemilih. "Tolong dibantu, dilirik kanan-kiri yang belum punya KTP, belum ngerekam KTP. *Dibaleni* ke adminduk, karena masih ada potensi yang tidak masuk. Masih ada waktu," jelasnya.

Eko juga menyoroti pada penyelenggaraan Pemilu 2019 lalu sedikitnya ada 19 petugas meninggal dunia. Ini harus menjadi perhatian di tahun 2024 nanti, upaya-upaya perlu dilakukan untuk mengantisipasi. Salah satunya penyelenggara kesehatan pemilu harus disiapkan. Begitu pula puskesmas di kota harus buka 24 jam. "Ini dinas kesehatan harus membantu penyelenggara pemilu untuk vitamin, termasuk vaksin *booster*. Segera bertemu DPRD Kota dan (Pj) wali kota, seluruh PPK harus divaksin dan booster," tambahnya.

Selain itu, soal politik uang harus menjadi perhatian pula. Menurutnya, seorang calon ketika berambisi menjadi anggota legislatif atau kepala daerah dengan menggunakan politik uang, maka sangat besar dana yang dikeluarkan untuk mendapatkan suara yang besar untuk terpilih.

"Kami khawatir pemilu yang berbiaya tinggi berdampak langsung pada kaitannya indeks korupsi. Partai politik dihadapkan pada tantangan bagaimana menekan biaya politik sekaligus memenangkan pemilu dengan cara yang benar. Ini tidak mudah," tambah Eko.

Ketua KPU Kota Jogja Hidayat Widodo mengatakan, saat ini tahapan pemilu sudah memasuki verifikasi pendaftaran dan penetapan partai politik. KPU Kota Jogja membantu ketugasan untuk melaksanakan verifikasi administrasi faktual dan kepengurusan maupun keanggotaan.

"Untuk sembilan partai sudah lolos administrasi, sudah punya kursi di DPRD pasca putusan MK. Maka dilanjutkan dengan verifikasi faktual keanggotaan kepada partai politik yang masih baru, ditetapkan tanggal 14," katanya.

Pihaknya juga sudah mengantongi daftar potensial pemilih Pemilu 2024 dari Dirjen Dukcapil. Selanjutnya pada bulan Februari akan membentuk Badan Ad Hoc sejumlah PPS tahun 2019 yaitu 1.373 PPS. "Nanti akan kami turunkan untuk mengecek data yang kami punyai dari Dirjen Dukcapil dan dari data kami sinkronkan. Kami turun ke bawah untuk menyimpulkan apakah data-data itu sudah *update* dengan situasi sekarang. Misalnya, mungkin ada yang sudah meninggal atau masuk wilayah kota dan lain-lain," jelasnya.

Kepala Kesbangpol Kota Jogja Budi Santoso menekankan kepada netralitas aparatur sipil negara (ASN). Dengan asas netralitas, setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014. "Waktunya memilih ya memilih, silakan saja yang penting punya keseimbangan," katanya.

Sementara Research Centre for Politic and Government Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Dias Prasongko mengatakan, untuk menjadi pemilih cerdas dibutuhkan langkah-langkah. Di antaranya, melihat secara kritis visi, misi dan program setiap calon wakil rakyat, calon presiden dan wakil presiden maupun partai politik yang akan dipilih. "Harus teliti melihat *track record* calon yang kita akan pilih," katanya.

Selain itu sering mengikuti informasi terkait pemilu dan teliti atas setiap informasi tentang pemilu yang diperoleh dari berbagai sumber. Bersikap objektif, kritis dan cerdas dalam menyikapi setiap isu politik dan pemilu. Dan kritis terhadap berita yang terindikasi hoaks dan tidak latah untuk menyebarkan. "Awasi juga kinerja dan realisasi janji politik setiap wakil rakyat terpilih," tambahnya.

Workshop pendidikan politik itu bertema "Strategi Mewujudkan Pemilu di Tahun 2024 yang Mengedepankan Persatuan dan Kesatuan Bangsa." Menghadirkan peserta dari perangkat kelurahan dan kemantren serta tokoh masyarakat di Kemantren Tegalrejo. Narasumbernya selain Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto, juga Ketua KPU Kota Jogja Hidayat Widodo, Kepala Kesbangpol Kota Jogja Budi Santoso serta dari Fisipol UGM Dias Prasongko.

Sub Koordinator Pendidikan Politik Kesbangpol DIY Sih Utami mengatakan, kegiatan ini digelar sejak 2 November lalu menyasar empat kabupaten dan satu kota. Di antara empat kabupaten telah selesai dilakukan, hanya tinggal beberapa kemantren di Kota Jogja.

Diharapkan dengan *workshop* ini para peserta selaku pemangku kepentingan bisa mensosialisasikan kepada masyarakat terkait beberapa persiapan Pemilu 2024. Tema yang diangkat juga mengandung makna, diharapkan ke depan Pemilu 2024 tidak menimbulkan terpecah belah. "Meskipun dengan pilihan berbeda, dengan partai yang berbeda tapi tetap mengomorsatukan persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai terpecah belah," harapnya. **(*/wia/laz/fj)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005